

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 21 Juli 2020

*Sumber Pengambilan Dokumen*

A	Provinsi Jawa Barat	
1	DPRD Jabar Soroti Penyerapan Anggaran	<i>Pikiran Rakyat/Hal. 4</i>

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : DPRD Jabar Soroti Penyerapan Anggaran

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal. 4

Edisi : Selasa, 21 Juli 2020

# DPRD Jabar Soroti Penyerapan Anggaran

## **BANDUNG, (PR).-**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait penyerapan anggaran yang dianggap bermasalah. Berbagai pertanyaan tersebut terlontar dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Serin (20/7/2020).

Sidang paripurna yang digelar tersebut mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat 2019.

Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat mengatakan, pertanyaan mengenai penggunaan anggaran daerah yang dinilai bermasalah itu untuk merespons anggota DPRD

Jawa Barat terhadap nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Barat TA 2019 pada 14 Juli 2020 lalu.

"Jadi, hasil dari tindak lanjut pembahasan di tingkat komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD itulah kemudian mengkristal dalam beberapa pertanyaan tersebut," kata Taufik di Gedung DPRD Jawa Barat.

Menurut Taufik, fraksi-fraksi memohon agar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dapat menjelaskan dari 8 pertanyaan yang mewakili pandangan umum fraksi tersebut di antaranya mengenai pendapatan daerah (PAD) yang tidak mencapai target sebagaimana telah ditetapkan.

## **Sumber pendapatan**

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Sri Rahayu Agustina, yang juga mewakili seluruh fraksi saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi memaparkan, masalah tersebut hadir akibat kurangnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan.

Dia mengatakan, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat, terdapat 54 permasalahan mengenai penerimaan Rp 67,42 miliar. "Untuk itu, kami meminta kepada Gubernur agar menjelaskan permasalahan tersebut," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sri Rahayu pun mencermati rendahnya penyerapan belanja daerah, yakni belanja tidak langsung sebesar 93,65 persen dan belanja langsung sebesar 85 persen.

Kemudian, merujuk pada hasil identifikasi BPK Perwakilan Jawa Barat, dikatakan Sri Rahayu, ditemukan 192 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja daerah yang diduga tidak sesuai ketentuan senilai Rp 113,69 miliar.

"Kami juga memohon kepada Gubernur (Ridwan Kamil) untuk menjelaskan perbedaan silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang dicantumkan pada APBD tahun 2020," tuturnya.

Dalam paparan pandangan umum itu pula mengemuka, fraksi-fraksi DPRD Jawa Barat meminta kepada Gubernur Jawa Barat

Ridwan Kamil dapat menjelaskan permasalahan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang sejauh ini dianggap bermasalah. Padahal, menurut Sri, keberadaan BUMD ini dapat menjadi sumber pemasukan daerah.

"Kita ketahui BUMD Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tulang punggung pemasukan daerah. Namun, sampai saat ini beberapa BUMD dalam pengelolannya masih ditemukan banyak permasalahan," ujarnya.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna penyampaian nota pengantar Gubernur Jawa Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2019 sebesar Rp 36,04 triliun lebih.

Sementara itu, Silpa APBD 2019 sebesar Rp 3,28 triliun. Silpa tersebut diketahui lebih besar dibandingkan dengan Silpa APBD 2018 sebesar Rp 3,06 triliun. (Ecep Sukirman)\*\*\*